

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder sebagai mereka yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi dan perusahaan bergantung untuk kelangsungan hidupnya (Freeman, 1984). Ada beberapa jenis pemangku kepentingan (*stakeholder*), seperti pemegang saham (*shareholders*), pekerja (*employees*), pemasok (*suppliers*), dan negara (*the state*). Identifikasi dan karakterisasi pemangku kepentingan membantu manajemen untuk mengetahui siapa yang dapat mempengaruhi pengelolaannya atau siapa yang terpengaruh olehnya. Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan tidak hanya bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Namun, perusahaan harus bermanfaat bagi kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain. Oleh karena itu, pemangku kepentingan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberadaan suatu perusahaan (Ghozali & Chariri, 2007).

Stakeholder dapat mengontrol perusahaan dalam hal keterbukaan informasi dan kegiatan operasi lainnya. *Stakeholder* memiliki hak untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan (Florenca & Handoko, 2021). Perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pengungkapan informasi seperti emisi karbon.

Teori *stakeholder* mengidentifikasi korelasi antara proses manajemen pemangku kepentingan dan kinerja perusahaan (Atti et al., 2019). *Stakeholder* pada dasarnya mempengaruhi keberadaan suatu perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus menjaga hubungannya dengan para *stakeholder* yang mempunyai kontrol atas pengadaan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kegiatan operasional perusahaan (Ghozali & Chariri, 2007). Dalam konteks penelitian ini, salah satu cara perusahaan dalam menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan adalah dengan mengungkapkan emisi karbon pada laporan tahunan atau laporan keberlanjutan.

2.1.2. Teori Legitimasi

Legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan agar mampu untuk dapat *survive* dan bertahan hidup (Dowling & Pfeffer, 1975). Legitimasi mempengaruhi cara orang berinteraksi dan memahami perusahaan. Oleh karena itu, masyarakat menganggap perusahaan tidak hanya berharga, tetapi juga signifikan, akurat, dan dapat dipercaya.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan akan berusaha untuk memastikan aktivitas yang dilakukan itu berada dalam batas-batas yang diakui di lingkungan tempat perusahaan menjalankan aktivitasnya dan masyarakat umum (Dewayani & Ratnadi, 2021). Teori legitimasi yang didasarkan pada adanya hubungan perusahaan dengan masyarakat membutuhkan sebuah tujuan institusi yang sejalan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi di antara nilai sosial dalam

kegiatan perusahaan dengan norma-norma perilaku masyarakat maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan (Ghozali & Chariri, 2007).

Dengan adanya undang-undang yang mengatur terkait pengungkapan emisi karbon seperti UU Nomor 17 Tahun 2004, UU Nomor 16 Tahun 2016, dan dokumen *National Determined Contributions* pertama Indonesia, perusahaan memiliki keharusan menjalankan segala aktivitas perusahaannya sesuai aturan yang berlaku demi menjaga hubungannya dengan masyarakat, misalnya pengungkapan emisi karbon dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Perusahaan harus dinilai berdasarkan pencapaian mereka (Suchman, 1995). Artinya, apabila masyarakat merasa terancam atas aktivitas perusahaan maka masyarakat dapat mencabut legitimasi yang telah diberikan kepada perusahaan.

2.2. Pengungkapan Emisi Karbon

2.2.1. Emisi Karbon

Emisi karbon adalah pembentukan karbon dari setiap gas menuju lapisan udara bumi (Borduas & Donahue, 2018). Emisi karbon termasuk salah satu jenis emisi GRK. Selain emisi karbon, GRK juga mengandung bahan lain seperti nitrogen dioksida (N₂O), metana (CH₄), dan freon (SF₆, HFC, dan PFC). GRK dihasilkan dari aktivitas sehari-hari manusia, tetapi emisi gas karbon semakin meningkat secara drastis sejak tahun 1850 yang disebabkan berkembangnya industri secara linier dengan konsumsi energi yang diperlukan (Evans, 2021).

Faktor yang paling berkontribusi dalam peningkatan emisi karbon, antara lain deforestasi, kebakaran lahan gambut, dan penggunaan batu bara (Dunne, 2019). Penggunaan energi listrik, penggunaan kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah adalah beberapa sumber emisi karbon yang dapat ditemukan di lingkungan kita. Emisi karbon merupakan kontributor perubahan iklim yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi (Angelina & Handoko, 2023). Salah satu cara untuk mengurangi dampak yang berlebihan dari upaya mengatasi ketidakstabilan ekonomi adalah dengan mengurangi emisi karbon.

2.2.2. Pengungkapan Emisi Karbon

Pengungkapan emisi karbon mencakup informasi yang diberikan oleh perusahaan pada laporan tahunan atau laporan keberlanjutan yang berkaitan dengan aktivitas bisnisnya yang berhubungan dengan emisi karbon. Dalam praktiknya, pengungkapan emisi karbon bagian dari subjek inti keempat (lingkungan) dalam CSR dan menjadi salah satu bagian permasalahan yang terdapat pada pengungkapan CSR di laporan tahunan atau laporan keberlanjutan.

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan yang melakukan aktivitas terkait sumber daya alam dapat mengungkapkan CSR terkait emisi karbon atau lingkungan. Namun, ini tidak berarti bahwa perusahaan yang tidak melakukan aktivitas terkait sumber daya alam, seperti di sektor keuangan, *retail*, farmasi, atau sektor lainnya tidak dapat mengungkapkan CSR terkait emisi karbon atau lingkungan. Hanya saja perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam lebih banyak

melakukan pengungkapan CSR dibandingkan perusahaan sektor lainnya, salah satunya pengungkapan emisi karbon.

Kebijakan pemerintah, seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 memiliki potensi untuk meningkatkan pengungkapan emisi karbon. Namun, kebijakan ini belum menjadi UU yang harus diikuti (belum bersifat wajib) atau masih bersifat sukarela. Pengungkapan emisi karbon memberikan legitimasi untuk semua tindakan perusahaan. *Stakeholder* akan menyatakan umpan balik kepada perusahaan yang memberikan informasi lingkungan.

Dalam penelitian ini, indeks pengungkapan digunakan untuk mengukur pengungkapan emisi karbon. Choi *et al* (2013) mengembangkan *checklist* yang terstruktur dari *request sheet* yang dirancang oleh CDP (*Carbon Disclosure Project*). Indeks pengungkapan emisi karbon terdiri dari lima kategori yang berkaitan dengan emisi karbon dan perubahan iklim, dengan total 18 item yang diidentifikasi. Lima kategori tersebut, yaitu:

Tabel 2.1.

Jumlah Indeks Pengungkapan Emisi Karbon

Kategori	Jumlah Item
Perubahan Iklim : Risiko dan Peluang (CC/ <i>Climate Change</i>)	2 item
Emisi Gas Rumah Kaca (GHG/ <i>Greenhouse Gas</i>)	7 item
Konsumsi Energi (EC/ <i>Energy Consumption</i>)	3 item
Pengurangan Gas Rumah Kaca dan Biaya (RC/ <i>Reduction and Cost</i>)	4 item
Akuntabilitas Emisi Karbon (AEC/ <i>Accountability of</i>	2 item

<i>Emission Carbon</i>)	
JUMLAH	18 item

Sumber: Terjemahan dari Choi *et al* (2013)

Jika perusahaan tidak mengungkapkan item *dari checklist* pada laporan keberlanjutan maka perusahaan akan diberi skor 0 pada indeks pengungkapan emisi karbon. Jika perusahaan mengungkapkan item *dari checklist* maka perusahaan akan diberi skor 1. Dari uraian di atas maka rumus yang akan digunakan sebagai berikut (Choi *et al.*, 2013):

$$\text{CED (Carbon Emission Disclosure)} = \frac{\text{Total Item yang Diungkapkan}}{\text{Total Item Keseluruhan}}$$

2.3. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Prihadi, 2020). Pengertian lain mengatakan bahwa profitabilitas adalah rasio yang memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam mengoptimalkan sumber dayanya agar dikonversi menjadi laba (Djaja, 2017). Berdasarkan kedua definisi di atas, profitabilitas dapat didefinisikan sebagai ukuran yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu.

Tolak ukur untuk menilai perusahaan apakah mampu bertahan dalam bisnisnya adalah tingkat profitabilitas yang konsisten. Tingkat risiko yang timbul dari investasi akan dikaitkan dengan profitabilitas perusahaan oleh investor (Hery, 2017). Rasio profitabilitas menjadi rasio kunci dalam laporan keuangan karena fokus utamanya adalah pendapatan atau laba operasional. Pendapatan atau laba digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan yang akan menciptakan keuntungan

bagi perusahaan. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka semakin besar dana yang dimiliki yang lebih memudahkan perusahaan dalam mengungkapkan informasi seperti emisi karbon.

Dalam penelitian ini, pengukuran profitabilitas akan menggunakan *Return on Asset* (ROA). ROA menunjukkan seberapa mampu suatu perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asetnya. ROA menggambarkan efektivitas perusahaan dalam memberdayakan asetnya (Djaja, 2017). Salah satu cara untuk mengetahui seberapa efisien dan efektif suatu perusahaan adalah dengan melihat ROA. ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Kasmir, 2018):

$$\text{Return on Asset (ROA)} = (\text{Laba Bersih} / \text{Total Aset})$$

2.4. Ukuran Perusahaan

Perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi besar atau kecil menurut berbagai cara, seperti pendapatan, total aset, dan total modal. (Basyaib, 2007). Jumlah total aset berkorelasi dengan ukuran perusahaan. Dengan kata lain, semakin banyak aset suatu perusahaan, semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dapat mengindikasikan banyaknya aktivitas operasional dan perusahaan besar cenderung memiliki aktivitas yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran kecil.

Perusahaan-perusahaan besar diyakini cenderung lebih sadar akan isu-isu terkait dengan lingkungan (Firmansyah et al., 2021). Perusahaan yang ukurannya lebih besar tentu memiliki kewajiban yang lebih besar terhadap masyarakat, pemerintah, kreditor, pemegang saham, dan investor. Oleh karena itu, perusahaan

yang lebih besar akan cenderung mengungkapkan emisi karbon sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan total aset perusahaan untuk mengukur ukuran perusahaan. Total aset tersebut akan ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural. Pengukuran ukuran perusahaan dapat menggunakan *firm size* yang didapatkan melalui penghitungan nilai logaritma natural total aktiva suatu perusahaan (Hartono, 2015). Tanpa mengubah proporsi aset yang sebenarnya, penggunaan logaritma natural akan menyederhanakan jumlah aset bernilai ratusan miliar bahkan triliun. Untuk mengukur ukuran suatu perusahaan, penelitian ini akan menggunakan rumus *firm size*. *Firm size* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Hartono, 2015):

$$\text{Firm Size} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Keterangan: Ln = Logaritma natural.

2.5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah seberapa banyak proporsi kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi, seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya (Hery, 2017). Kepemilikan institusional merupakan gambaran mengenai komposisi kepemilikan saham dalam periode waktu tertentu, yang dimiliki oleh institusi atau organisasi atau koperasi (Suteja, 2020). Kedua definisi di atas menunjukkan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi.

Investor luar seperti kepemilikan institusional dapat mengurangi kesempatan manajer dalam melakukan tindakan *fraud*, yaitu melakukan

pengawasan optimal terhadap aktivitas manajemen sebagai *monitoring agent* (Sugiarto, 2009). Melalui pengawasan, pihak manajemen akan selalu ditekan untuk memberikan kebutuhan informasi yang diperlukan investor, seperti pengungkapan emisi karbon. Semakin besar kepemilikan sebuah institusi, semakin besar dorongan untuk mengontrol tindakan dan aktivitas manajemen. Hal ini dilakukan untuk membantu manajemen dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan. Salah satu cara manajemen dipandang baik dalam kinerjanya, yaitu melakukan pengungkapan informasi terkait emisi karbon.

Didasarkan pada pengertian Suteja (2020), pengukuran kepemilikan institusional dalam penelitian ini dapat dihitung menggunakan komposisi kepemilikan saham dibandingkan jumlah saham yang beredar, rumusnya sebagai berikut (Suteja, 2020):

$$\text{KI (Kepemilikan Institusional)} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Akhiroh & Kiswanto (2016) dengan judul “*The Determinant Of Carbon Emission Disclosures*”. Penelitian ini menggunakan perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014 sebagai subjeknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa visibilitas organisasional, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sementara itu, kinerja lingkungan, *financial distress*, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Astiti & Wirama (2020) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2018 sebagai subjeknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tipe industri dan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sementara itu, ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian terdahulu ketiga dilakukan oleh Sekarini & Setiadi (2021) menguji dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan”. Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018 sebagai subjeknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sementara itu, profitabilitas dan kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian terdahulu keempat dilakukan oleh Angelina & Handoko (2023) menguji dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon”. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020 sebagai subjeknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan

institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sementara itu, kinerja lingkungan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian terdahulu kelima dilakukan oleh Suherman & Kurniawati (2023) menguji dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Environmental Management System*, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap *Carbon Emissions Disclosure*”. Penelitian ini menggunakan perusahaan industri energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021 sebagai subjeknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *environmental management system* dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sementara itu, profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Tabel 2.2.

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Akhiroh & Kiswanto (2016)	Variabel dependen (Y): Pengungkapan emisi karbon Variabel independen (X): Visibilitas organisasional, profitabilitas, kepemilikan manajerial, komite audit, kinerja lingkungan, <i>financial</i>	Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014	1. Visibilitas organisasional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. 2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. 3. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap

		<i>distress</i> , kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen		<p>pengungkapan emisi karbon.</p> <p>4. Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.</p> <p>5. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.</p> <p>6. <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.</p> <p>7. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.</p> <p>8. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.</p>
2.	Astiti & Wirama (2020)	<p>Variabel dependen (Y): Pengungkapan emisi karbon</p> <p>Variabel independen (X): Tipe industri, <i>good corporate governance</i>, <i>leverage</i>, ukuran</p>	Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2018	<p>1. Tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.</p> <p>2. <i>Good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.</p> <p>3. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif</p>

		perusahaan, dan profitabilitas		terhadap pengungkapan emisi karbon. 4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. 5. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
3.	Sekarini & Setiadi (2021)	Variabel dependen (Y): Pengungkapan emisi karbon Variabel independen (X): <i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kinerja lingkungan	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018	1. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. 2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. 3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. 4. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
4.	Angelina & Handoko (2023)	Variabel dependen (Y): Pengungkapan emisi karbon Variabel independen (X): Kepemilikan institusional, komite audit,	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020	1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. 2. Komite audit berpengaruh positif terhadap

				<p>pengungkapan emisi karbon.</p> <p>3. Kinerja lingkungan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.</p>
5.	Suherman & Kurniawati (2023)	<p>Variabel dependen (Y): Pengungkapan emisi karbon</p> <p>Variabel independen (X): <i>Environmental management system</i>, komite audit, profitabilitas, dan kepemilikan institusional</p>	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021	<p>1. <i>Environmental management system</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.</p> <p>2. Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.</p> <p>3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.</p> <p>4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.</p>

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Dilihat dari perspektif teori legitimasi, bahwa pada dasarnya, diperlukan sebuah tujuan institusi yang sejalan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat (Dowling & Pfeffer, 1975). Untuk menciptakan tujuan yang sejalan dengan norma dan nilai yang berlaku, membutuhkan biaya yang besar. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi menandakan kinerja keuangan

perusahaan baik dan perusahaan mampu untuk mengungkapkan emisi karbon dalam mencapai dan mendapatkan kepercayaan masyarakat (legitimasi publik). Hal ini dikarenakan perusahaan tidak hanya berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya saja, tetapi juga berusaha untuk menyelaraskan kegiatan operasional dengan norma dan prinsip masyarakat. Berdasarkan teori *stakeholder*, dengan mengungkapkan emisi karbon itu dapat menjadi cara bagi perusahaan dalam menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan yang memiliki kontrol dalam menyediakan sumber daya bagi kegiatan operasional perusahaan.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Prihadi, 2020). Pengertian lain mengatakan bahwa profitabilitas adalah rasio yang memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam mengoptimalkan sumber dayanya agar dikonversi menjadi laba (Djaja, 2017). Tolak ukur untuk menilai perusahaan apakah mampu bertahan dalam bisnisnya adalah tingkat profitabilitas yang konsisten.

Penelitian terdahulu oleh Akhiroh & Kiswanto (2016) yang dilakukan pada perusahaan perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin besar tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan.

Perusahaan dengan profitabilitas rendah harus berkonsentrasi pada tujuan keuangan dan peningkatan kinerja sehingga mereka memiliki

kemampuan terbatas untuk mencegah dan melaporkan emisi karbon, sedangkan perusahaan dengan profitabilitas tinggi mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan informasi lingkungan (Luo et al., 2013). Profitabilitas yang tinggi menandakan perusahaan memiliki ketersediaan dana yang cukup dan menandakan kinerja keuangan dalam kondisi baik sehingga dapat dijadikan dasar untuk menuntut perusahaan dalam melakukan pengungkapan emisi karbon. Walaupun pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela, tetapi perusahaan dengan kinerja yang lebih baik tentu lebih memungkinkan dalam mengungkapkan emisi karbon. Oleh karena itu, besar kecilnya profitabilitas suatu perusahaan mampu mempengaruhi tingkat pengungkapan emisi karbon.

Berdasarkan teori yang ada dan diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Akhiroh & Kiswanto (2016) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1 = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

2.7.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Emisi

Karbon

Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan yang memiliki ukuran besar tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap pemangku kepentingan. Perusahaan harus menjaga hubungannya dengan pemangku kepentingan yang berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan operasional perusahaan. Hal ini akan mendorong

perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon sebagai salah satu cara menjaga hubungan dengan pemangku kepentingannya. Melalui pengungkapan emisi karbon, hal itu juga menjadi cara perusahaan dalam mendapatkan legitimasi publik yang tentu membantu kegiatan operasional perusahaan.

Jumlah aset dan penjualan bersih menunjukkan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan (Hery, 2017). Jumlah aset dan penjualan yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ukuran yang lebih besar (Hery, 2017). Jumlah aset berkorelasi positif dengan ukuran suatu perusahaan. Dengan kata lain, semakin banyak aset suatu perusahaan, semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang lebih besar lebih rentan terhadap masalah lingkungan dan lebih cenderung untuk menunjukkan respon lingkungan yang lebih baik.

Penelitian terdahulu oleh Sekarini & Setiadi (2021) yang dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan juga semakin besar.

Perusahaan yang lebih besar cenderung untuk memberikan pengungkapan sukarela yang lebih berkualitas untuk mendapatkan legitimasi, dan perusahaan yang lebih besar mengungkapkan secara detail tentang polusi karena keunggulan biaya kompetitif yang dimiliki. Perusahaan besar lebih mungkin mengungkapkan pengungkapan emisi karbon daripada perusahaan

kecil karena sumber daya yang lebih banyak akan membuat perusahaan lebih mampu dan lebih cepat dalam menyediakan informasi kepada pihak luar (Irwhantoko & Basuki, 2016). Oleh karena itu, informasi yang diungkapkan oleh perusahaan besar tidak sebanyak yang diungkapkan oleh perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan besar akan menyadari aktivitas perusahaan karena dapat berpengaruh besar pada pencemaran lingkungan.

Berdasarkan teori yang ada dan diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sekarini & Setiadi (2021) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

2.7.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan

Emisi Karbon

Berdasarkan teori *stakeholder*, eksistensi suatu perusahaan dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder*. Kepemilikan institusional yang besar akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang dilakukannya, seperti pengungkapan emisi karbon untuk meningkatkan citra positif dari para *stakeholder*. Perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon akan mendorong investor institusional dalam memilih investasi apa yang akan mereka lakukan dan mendukung mereka dalam mengakomodasi kegiatan operasional perusahaan. Semakin besar pengungkapan yang dilakukan

perusahaan akan membantu investor institusional membuat keputusan investasi serta mendapat legitimasi publik.

Kepemilikan institusional adalah seberapa besar kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan lainnya (Hery, 2017). Investor luar seperti kepemilikan institusional dapat mengurangi kesempatan manajer dalam melakukan tindakan *fraud*, yaitu melakukan pengawasan optimal terhadap aktivitas manajemen sebagai *monitoring agent* (Sugiarto, 2009). Melalui pengawasan, pihak manajemen akan selalu ditekan untuk memberikan kebutuhan informasi yang diperlukan investor, termasuk pengungkapan emisi karbon.

Penelitian terdahulu oleh Angelina & Handoko (2023) yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan juga semakin besar.

Dengan kepemilikan institusi yang tinggi, investor institusional akan melakukan lebih banyak pengawasan untuk menghentikan tindakan oportunistik manajer dan mengurangi penyelewengan manajemen. Pengawasan investor institusional sangat dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan. Jumlah kepemilikan institusi keuangan menunjukkan dorongan yang lebih besar untuk mengawasi manajemen dengan tujuan meningkatkan kemampuan manajemen

dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan. Dengan melakukan pengungkapan, perusahaan akan dinilai dengan baik.

Berdasarkan teori yang ada dan diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Angelina & Handoko (2023) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3 = Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

